



**Judul** : Dampak Pilpres 2024, DPR Terbelah Tiga  
**Tanggal** : Minggu, 29 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

# Dampak Pilpres 2024, DPR Terbelah Tiga

PERTARUNGAN Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 ini kemungkinan besar ikut berimbas kepada peta koalisi di Senayan. Dengan adanya tiga pasangan Capres-Cawapres, DPR pun bakal terpecah menjadi tiga kekuatan. Adapun peta koalisi tersebut, pertama, PDI Perjuangan dan PPP yang merupakan partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua, Nasdem, PKB dan PKS, pendukung Anies Baswedan-Muhammad Iskandar. Ketiga, Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN, yang merupakan partai pendukung Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Tentu pada konteks tugas DPR, bagaimana proses pengawasan, bagaimana proses tahapan ini akan dilakukan, ya mau tidak mau, akhirnya DPR terbelah menjadi tiga kekuatan," kata Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR, di Jakarta, kemarin. Kondisi itu, sambung politisi Fraksi PKB ini, tentu akan berpengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan di Dewan. Salah satunya ketika, keputusan yang diambil di DPR adalah melalui proses mekanisme voting. "Kalau proses politik ini terus berjalan, dan dalam momen tertentu voting, ya votingnya pasti ramai," ujarnya. Dengan melihat peta dukungan tersebut, Syaiful menilai, partai pendukung Prabowo-Gibran yang saat ini cukup dominan. Dengan komposisi 4 partai pendukung, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN tentu akan membuat Prabowo-Gibran sebagai partai mayoritas di Dewan. "Kalau terjadi voting, saya kira Golkar, PAN, Gerindra, dan Demokrat yang menang. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh DPR, tergantung konfigurasi koalisi. Kalau ada voting, ya kita lihat saja nanti seperti apa votingnya. Tapi kalau kasat mata kita lihat, ya tiga sudut itu yang ada di DPR ini," ungkapnya. Karena itu, menurut Syaiful, DPR secara institusi tentu harus tetap menggunakan asas obyektivitas. Dalam hal ini terkait dengan 4 tahapan pemilu yang akan dihadapi, yakni tahapan penetapan peserta Pilpres 2024, masa kampanye, masa tenang, masa tenang, dan masa pemilihan. "Ketika masuk pada tahapan kelima, yakni penetapan (pemenang Pilpres), hampir pasti terjadi putaran kedua Pilpres, mau tidak mau Pemerintah dan KPU sudah harus siap dari sekarang," tegasnya. Syaiful menuturkan, secara normatif pelaksanaan Pilpres kini menyisakan 4 tahapan. Yakni, penetapan pasangan capres-cawapres pada 13 November 2023, kemudian masa kampanye yang dimulai 28 November 2023. Lalu, masa tenang dan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sejah ini, seluruh tahapan masih berlangsung seperti biasa. Penetapan (peserta Pilpres 2024) tinggal menunggu keputusan KPU. Berikutnya masa kampanye yang hanya 75 hari. "Dinamikanya nanti seperti apa dan akan diwarnai apa, kita tunggu saja apa yang akan terjadi antara poros Ganjar dan Prabowo. Sebab, pasangan Amin kan relatif *so far so good*, tidak menjadi bagian dari proses pembentukan poros terakhir Prabowo-Gibran," tambahnya. ■ KAL